

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan relasi kekuasaan para aktor dalam proses penyusunan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini mencoba mengungkap dua hal pokok dalam relasi kekuasaan tersebut: pertama, bagaimana relasi para aktor politik yang terlibat dalam penyusunan Perda. Kedua, siapa aktor yang mendominasi dalam proses penyusunan Perda pilkades di kabupaten Bangkalan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif. Penulis ingin mengungkap lebih dalam lagi tentang hal yang masih belum diketahui terkait relasi kekuasaan dalam proses penyusunan Perda pilkades di Bangkalan. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi yang terjadi adalah 1) relasi antara aktor eksekutif dengan aktor legislatif, 2) relasi kepala desa dengan aktor eksekutif, 3) relasi aktor legislatif dengan LSM, dan 4) relasi aktor legislatif dengan kepala desa. Relasi yang mereka bangun adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Relasi mereka sudah didesain semenjak Fuad Amin menjadi Bupati Bangkalan selama dua periode. Relasi yang dibangun bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan aktor eksekutif yang sekarang, yakni Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. Kemudian dominasi dalam penyusunan Perda No 1 Tahun 2015 didominasi oleh aktor eksekutif. Hal tersebut terjadi karena hak inisiatif penyusunan Perda dimiliki oleh aktor eksekutif serta relasi yang sudah dibangun antara pihak eksekutif dan kepala desa di Bangkalan.

Kata Kunci: relasi aktor politik, dominasi kekuasaan, penyusunan Perda

ABSTRACT

This study aimed to describe the power relations of the actors in the formulation of the Regional Regulation No. 1 Year 2015 on Guidelines for Selection of Village Heads in Bangkalan. This research attempts to reveal two main points in the power relationship: First, the relationships among the political players involved in lawmaking. Second, who the actor who dominate the lawmaking process of the elections and in the district, Bangkalan.

This study uses a qualitative exploratory. The author would like to uncover more about the things that are still unknown related power relations in the lawmaking process Pilkades in Bangkalan. The research data was obtained through in-depth interviews and documentation.

The results showed that the relationships that occur are 1) the relationship between the actor executive with legislative actors, 2) relations with the village chief executive actors, 3) legislative actors relations with NGOs, and 4) the actor legislative relations with the village head. Relationships that they build is in order to retain power. Their relationship has been designed since Bangkalan Regent Fuad Amin during the two periods. Relationships that are built actor aims to preserve the power of the executive is now, the Regent and Vice Regent Bangkalan. Then dominance in lawmaking No 1 of 2015 is dominated by the executive actors. This happens because the lawmaking initiative rights owned by executive actors and relations that have been built between the executive and the head of the village in Bangkalan.

Keywords: relations of political actors, the domination of power, lawmaking